

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini laju pertumbuhan penduduk semakin tak terkendali seiring dengan perkembangan zaman. Indonesia sebagai negara yang berkembang dan giat melaksanakan pembangunan disegala bidang yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dapat mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang disebabkan semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya tingkat konsumsi terhadap barang-barang produksi.

Seiring pembangunan yang semakin meningkat oleh karena itu diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Maka dari itu pemerintah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan ini memperoleh sumber pembiayaan baik dari luar negeri berupa pinjaman dari luar negeri maupun sumber dari dalam negeri berupa penjualan hasil alam dan produksi dalam negeri serta penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Dengan adanya kebijaksanaan dari pemerintah, maka sumber pembiayaan yang didorong peningkatannya adalah yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri baik

dengan ekspor komoditi serta penerimaan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Adapun sumber pembiayaan pembangunan yang diperoleh dari dalam negeri hendaknya digali secara intensif dan efektif serta bertanggung jawab tanpa melupakan azas keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini peran dan tanggung jawab masyarakat dalam keikutsertaannya dibidang pembangunan sangat diharapkan oleh pemerintah, salah satu peran dari masyarakat tersebut adalah kontribusi sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Semua sumber pendapatan daerah tersebut digunakan dan dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB. Pajak daerah Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dan pajak lainnya.

Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dapat ditandai dengan naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di masyarakat. Dewasa ini kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri sarana transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian.

Hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor. Seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat, maka kontribusi dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor juga terus diupayakan. Data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1: Realisasi penerimaan PKB Provinsi Gorontalo

Tahun	Realisasi PKB	Realisasi BBNKB	PAD
2003	Rp8,224,568,123	Rp10,234,568,702	Rp32,633,915,878
2004	Rp10,654,125,000	Rp12,458,751,223	Rp37,821,371,634
2005	Rp13,002,622,600	Rp14,793,465,400	Rp46,112,985,888
2006	Rp15,242,926,450	Rp16,309,214,300	Rp54,115,210,894
2007	Rp18,717,293,300	Rp22,984,200,900	Rp70,078,789,332
2008	Rp23,788,620,300	Rp35,837,364,400	Rp97,127,666,982
2009	Rp29,094,352,800	Rp36,464,804,000	Rp102,626,018,112
2010	Rp37,695,619,718	Rp58,927,751,550	Rp113,124,917,186
2011	Rp46,234,705,090	Rp71,352,299,350	Rp156,855,632,607
2012	Rp54,644,527,740	Rp80,423,353,700	Rp162,180,391,844

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Gorontalo*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang relatif besar selama periode 2003-2004. Namun, sering dengan besarnya jumlah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

kendaraan bermotor tidak diikuti oleh kesadaran pengguna kendaraan bermotor dalam hal membayar pajak sehingga adanya penunggakan pajak kendaraan bermotor. Seperti yang terlihat dalam tabel tunggakan pajak berikut:

Tabel 2: Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Tunggakan					
		2010		2011		2012	
		Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4
1	Kota Gorontalo	1.274.543.604	389.658.876	1.246.628.790	630.580.434	957.475.108	744.807.086
2	BoneBolango	226.377.588	62.103.732	463.445.674	99.760.878	465.220.990	91.203.348
3	Kab. Gorontalo	1.051.965.492	189.416.628	1.290.211.220	374.339.980	1.143.663.494	474.080.998
4	Gorontalo Utara	6.083.388	10.266.000	9.043.020	3.031.080	37.721.254	61.812.324
5	Kab. Boalemo	280.821.921	9.541.116	297.023.220	49.086.270	202.285.928	63.817.190
6	Kab. Pohuwato	401.527.512	90.791.460	470.411.234	99.569.528	233.005.446	104.264.012

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. Gorontalo*

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi yang relatif cukup besar baik dalam besaran jumlah rupiah maupun fisik kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Besarnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar dan melaporkan kendaraannya sehingga kendaraan tersebut berpindah-pindah tangan tanpa mengurus Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu perlu adanya kontribusi yang diberikan masyarakat untuk pemerintah yang nantinya dapat dikembalikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana umum maupun sektor-sektor lainnya.

Nurmanto (2003: 5) mendefinisikan kontribusi sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut adalah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah.

Bentuk kontribusi yang dapat diberikan masyarakat kepada pemerintah yaitu dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dalam pemungutan PKB dan BBNKB ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Keuangan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Selanjutnya dalam mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan nusantara, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor oleh daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara nasional.

Disadari dengan adanya peningkatan sumber pendapatan daerah, maka pembangunan daerah akan semakin berjalan dengan lancar. Untuk itulah pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mencoba meningkatkan minat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak daerah khususnya PKB dan BBNKB. Dengan meningkatnya minat wajib pajak untuk membayar pajak, maka sudah dapat dipastikan bahwa pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yakni:

1. Kurangnya responsif pemerintah dalam hal penagihan pajak kendaraan bermotor sehingga masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor.
2. Kurangnya sosialisasi dalam hal pengurusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan membayarkan pajak kendaraannya.

3. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah Provinsi Gorontalo yang beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo akan tetapi tidak mengurus bea balik nama kendaraan bermotor.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah teridentifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apakah kontribusi PKB dan BBNKB berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo?
2. Apakah kontribusi PKB dan BBNKB berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi PKB dan BBNKB secara parsial terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi PKB dan BBNKB secara simultan terhadap peningkatan asli daerah Provinsi Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah dalam hal ini PKB dan BBNKB terhadap pendapatan asli daerah provinsi Gorontalo.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah provinsi Gorontalo dalam pembuatan kebijakan tentang pajak daerah khususnya PKB dan BBNKB dalam peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Gorontalo.